

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke – 5  
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021  
Selasa, 15 September 2020**

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB)**

Nama	Pernyataan	Keterangan
<p><b>H.SYHRULAI MAAZAT,L.C.,M.A. A-418/F-PKS/DAPIL: RIAU II</b></p>	<p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i> Syahrulaidi Maazat Nomor Anggota A-418 F-PKS Dapil Riau. Di forum yang terhormat ini, di forum yang kita bebas menyampaikan aspirasi dan permasalahan rakyat, di forum yang dihadiri oleh pemegang kebijakan untuk Negara ini, saya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Riau.</p> <p>Disaat kita sedang membahas anggaran APBN 2021 dan sebagaimana kita ketahui dan kita sepakati bersama bahwasanya tujuan akhir APBN kita adalah untuk kesejahteraan Rakyat. Disaat masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi karena pandemic Covid-19 saat ini pula ribuan masyarakat Riau terancam kelaparan, terancam kelaparan tepatnya di Desa Simpang Raya Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Provinsi Riau karena kebun sawit mereka yang mereka tanam 25 tahun yang lalu di tumbangkan oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut menang dalam pengadilan.</p> <p>Oleh karena itu saya sebagai Anggota DPR RI perwakilan Riau ingin menyampaikan kepada kita semua;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hendaknya Pemerintah pusat adil untuk masyarakat Riau dalam menyelesaikan sengketa lahan yang lebih kurang 312 sengketa lahan dengan perusahaan dengan masyarakat pendekatan selama ini hanyalah pendekatan pengadilan hukum, sementara padahal rakyat tak punya uang dan biaya untuk membayar kuasa hukum dalam menyelesaikan sengketa lahan mereka di Pengadilan, sehingga rakyat selalu dikalahkan.</li> <li>2. Saya meminta kepada Pemerintah pusat agar melakukan penertiban terhadap perusahaan perkebunan yang ada di Riau ada perusahaan yang menguasai lahan</li> </ol>	

Nama	Pernyataan	Keterangan
	<p>melebihi dari izin yang diberikan ke mereka, ada perusahaan yang tak memiliki izin, ada perusahaan yang menggarap perkebunan diatas kawasan hutan bahkan perusahaan plat merahpun tak luput dari kasus-kasus diatas, agar masyarakat Riau merasakan dan menikmati kemerdekaannya, agar masyarakat Riau tidak hanya bangga memiliki sumber daya alam yang dibawah minyak diatas minyak tetapi masyarakat Riau hanya menjadi penonton.</p> <p>Mohon kepada Pimpinan untuk disampaikan kepada pemegang kebijakan agar menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang ada di Riau sebanyak 312 sengketa lahan, kalau ini bisa diselesaikan <i>inshaallah</i> kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Riau bisa di hidupkan.</p> <p>Terima kasih.</p> <p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i></p>	

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.21 WIB)

JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2020  
 KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN PARIPURNA,



Rachmi Suprihartanti Septiningtiyas, S.H., M.H.  
 NIP. 196709251994032003